



## PELAKSANAAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SELAKU PEJABAT UMUM DI KOTA MAKASSAR

Oleh :

Fitra Noviyanti<sup>1</sup>, Djoko Sukisno<sup>2</sup> dan Farida Patittingi<sup>3</sup>

### Intisari

Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Selaku Pejabat Umum Di Kota Makassar bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) permasalahan: Bentuk pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan penerapan sanksi pelanggaran yang dilakukannya.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan tidak meninggalkan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Subjek penelitian terdiri dari narasumber yaitu pejabat Badan Pertanahan Nasional dan responden yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang ditentukan dengan metode non random sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan dititikberatkan pada semua produk Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa akta-akta dan administrasi baik berkaitan dengan akta maupun tidak, yang dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, hanya sebatas teguran tertulis saja dan tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, karena kesalahan yang terjadi masih sering dilakukan berulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada tindakan yang lebih tegas dalam rangka pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kata-kata kunci: Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

---

<sup>1</sup> Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## THE IMPLEMENTATION OF CONTROL FOR LAND CERTIFICATE – MAKING OFFICIAL AS A PUBLIC OFFICIAL IN MAKASSAR CITY

By  
Fitra Noviyanti<sup>1</sup>, Djoko Sukisno<sup>2</sup>, and Farida Pattitingi<sup>3</sup>

### ABSTRACT

The research on the Implementation of Control for Land Certificate-Making Official As a Public Official aims to address two issues: the form of control for the performance of land certificate-making official, and the sanction imposed for any misconduct he/she does.

This research is a juridical normative research, which focuses on field research to obtain primary data. However, it is also completed with library research for secondary data. It was conducted in Makassar city. The research subject consisted of resource persons, namely the officials from National Land Affairs Body, and respondents, namely the land certificate-making officials selected in non-random sampling method. The data were analysed descriptively and qualitatively.

The research results show that the implementation of assistance and control for Land Certificate-making official by the Office of Land Affairs is conducted annually, by focusing it on the products of Land Certificate-making official, i.e., are acts and administration - either related or not related to the act. The implementation of sanction for Land Certificate-Making Official who committed misconduct while serving the public, is only a written reprimand which is usually ignored by this official, as reflected in his/her repeated mistakes. This evidence proves that more decisive actions need to be taken in giving assistance for Land Certificate-Making Officials

Keywords: Control for Land-Certificate making official.

---

<sup>1</sup> Master of Notary Program, Gadjah Mada University

<sup>2</sup> Faculty of Law, Gadjah Mada University

<sup>3</sup> Faculty of Law, Hasanuddin University